

Kambing Hitam

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus
dari Universitas Monash, Australia



Apakah yang mirip di antara LGBTQ, simpatisan PKI, dan etnis Tionghoa? Semuanya pernah jadi kambing hitam dalam sejarah negeri ini. Mereka dikambinghitamkan pada waktu yang berbeda, sesuai perubahan kebutuhan penguasa, mengikuti perubahan cuaca politik negara.

Sebagian penduduk di negeri ini sudah lama bersikap negatif secara pasif terhadap LGBTQ. Sebagian yang lain tidak peduli. Mereka tidak menolak atau mendukung LGBTQ, karena tidak merasa berurusan dengan LGBTQ dan tidak merasa terganggu dengan kehadiran LGBTQ. Dulu kemajemukan sikap masyarakat itu meluas tanpa gejala nasional.

Mengapa belakangan soal LGBTQ jadi gaduh? Kuncinya pada kebijakan negara. Oktober 2025 lalu ada peraturan presiden (perpres) yang menyatakan "penyebaran budaya LGBTQ" (lesbian, gay, biseksual, transjender, dan *queer*) sebagai ancaman terhadap negara. Kontroversinya sempat meledak pada tengah tahun 2026 ini, setelah ada yang membahas usulan RUU sanksi pidana.

Kekerasan terhadap LGBTQ bisa terjadi sehari-hari tanpa campur tangan negara. Namun, apabila negara membiarkan, apalagi menyatakan permusuhan terhadap mereka, ibaratnya menyiramkan bahan peledak ke bara api. Sama dengan rasisme terhadap etnik, prasangka agama atau ideologi tertentu. Tanpa kebijakan lembaga publik, semua itu hanya riak-riak kecil sesaat dan lokal.

Sejumlah negara lain menggalakkan aturan resmi melindungi LGBTQ dengan sanksi bagi pelaku diskriminasi terhadap mereka. Langkah Pemerintah RI persis sebaliknya. Ini bukan perbedaan jati diri bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Di sana LGBTQ juga terancam berbagai diskriminasi dan kekerasan swasta,

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

Kambing Hitam

(Sambungan dari halaman 1)

seperti di Indonesia. Yang berbeda adalah sikap dan kebijakan negara terhadap hal-hak sipil yang setara bagi warganya.

Jauh sebelum terbentuknya bangsa-negara Indonesia, transpuan atau yang dulu disebut wadam hidup berdamaian dalam masyarakat ini. Toleransi masa itu mungkin malah lebih baik daripada di banyak negara lain. Bahkan di masa brutalnya represi Orde Baru, sebagian wadam menjadi primadona panggung atau bintang film. Mereka lebih *gemoy* ketimbang calon presiden mana pun.

Bagaimana LGBTQ bisa dianggap ancaman terhadap negara? Topik ini sulit dibahas terbuka dan kritis, jika jatuhnya ke soal tafsir ajaran agama. Jangankan agama, bahkan dalam sains pun ada banyak tafsir. Namun berbeda dari komunitas agama, komunitas sains tidak sekadar toleran, tetapi gemar adu argumentasi, data empirik, dan analisis kritis.

Tidak jelas apa persisnya makna "penyebaran budaya LGBTQ". Pawai umum atau konser musik di tempat umum untuk merayakan orientasi seksual LGBTQ? Apakah negara akan melindungi acara mereka yang tertutup di ruang privat? Andaikan pawai umum atau konser musik pro-LGBTQ dianggap menyebarkan budaya LGBTQ, apakah musik Natal di ruang publik bisa dipahami sebagai kristenisasi? Poster bergambar tentara bisa dianggap penyebaran militerisme?

Pembahasan seperti itu mubazir, kata sebagian pihak. Mereka yakin, isu LGBTQ merupakan siasat murahan dari pemerintah yang berusaha mengalihkan perhatian publik dari berbagai skandal politik dan ekonomi. Dengan demikian, frustrasi massa dapat dialihkan menjadi konflik horizontal antarwarga, bukan kepada pejabat publik. Kini LGBTQ jadi kambing hitam karena mereka rentan dan pemerintah kehabisan stok kambing hitam.

Isu LGBTQ hanya contoh mutakhir dari serangkaian gejala bangkrutnya toleransi terhadap kemajemukan. Gejala serupa melanda banyak negeri lain. Dalam beberapa kasus, minoritas itu seakan-akan sudah divonis sebagai musuh bersama. Mereka dianggap layak dikeroyok beramai-ramai kapan saja, di mana saja, secara fisik atau simbolik. Bukannya dipahami sebagai sesama manusia yang berbeda dari pembencinya dalam satu hal (yakni orientasi seksual), tapi dipandang lebih rendah dari manusia atau bukan manusia.

Nasib seperti itu bukan monopoli LGBTQ. Mayoritas dari jutaan warga minoritas yang oleh Orde Baru diberi label "nonpribumi" atau "WNI Keturunan China" bernasib serupa dalam seabad terakhir. Diskriminasi lebih parah dialami oleh ratusan ribu warga sebangsa yang dituduh "Terlibat G30S/PKI". Keluarga mereka diberi label "Tidak Bersih Lingkungan". Dengan skala berbeda, diskriminasi serupa dialami penganut sekte agama yang dianggap "sesat". Yang lain diberi label "kadrun", karena berlatar belakang etnis atau budaya Timur Tengah.

Tampilan pria gemulai dan nasib bendera pelangi dicurigai dan dimusuhi. Selama abad ke-20 berbahasa Mandarin, nama-nama Tionghoa atau perayaan Imlek bernasib lebih buruk. Apalagi nasib gambar palu-arit dan lagu "Genjer-genjer". Penggunaan jilbab pernah dibatasi.

Selain ratusan ribu yang dibunuh, sekitar 10.000 anggota dan simpatisan (atau diduga simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) ditahan tanpa diadili 10 tahun atau lebih. Hak berpolitik mereka yang sah, tiba-tiba dianggap kejahatan pidana sejak Maret 1966. Mereka dihukum dengan dalih akan disembuhkan secara mental agar menjadi lebih "pancasila" menurut versi Orde Baru. Penindasan budaya dan hak sipil Tionghoa dipropagandakan sebagai proses yang mirip "penyembuhan" agar mereka menjadi "lebih Indonesia" dalam rasisme Orde Baru.

Di awal kemerdekaan, Indonesia dibangun para cendekiawan negeri ini. Mereka fasih bicara maupun menulis dalam multibahasa Asia maupun Eropa. Bacaan mereka global. Wawasan nasionalisme mereka berwatak kosmopolitan. Salah satu contoh produk mereka adalah Pancasila, berisi kumpulan gagasan progresif dan ideologi yang diimpor dari berbagai bangsa dan peradaban dunia.

Kesibukan mencari jati diri "Indonesia asli" marak pada tahun 1950-an. Di akhir dekade itu Indonesia mencicipi otoritarianisme. Sejak 1966 otoritarianisme itu disempurnakan Orde Baru. Begitu juga kesibukan berfantasi tentang kepribadian asli nasional sambil mengumbar rakusnya nafsu kapitalisme global. Pancasila dijadikan senjata memukul lawan politik.

Kini, penguasa dan sebagian masyarakat pasca-Orde Baru tampaknya masih asyik kecanduan warisan Orde Baru, walau dalam kemasan baru dan kambing hitam berbeda.